

## ABSTRAK

Pasal 54 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas dan pasal 480 KUHP mengatur larangan siapa saja yang tidak diperbolehkan untuk meniru ataupun memalsukan Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk solar, hal tersebut bertentangan dengan tindakan yang dilakukan oleh tersangka DAA dan MK di Kecamatan Kertapati Kota Palembang yang melakukan tindak pidana pengoplosan bahan bakar minyak jenis solar. Pokok kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana bagi pelaku pengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang melakukan tindak pidana pengoplosan BBM. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana bagi pelaku pengoplos bahan bakar minyak (BBM), dan tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Empiris, yaitu dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengambil tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan terhadap pelaku selama menjalani masa pidananya. Yaitu mencangkup suatu jaringan sistem peradilan yaitu sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga permasyarakatan yaitu sebagai sarana utamanya. Menurut Pandangan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, bahwa pelaku dikenakan hukuman *ta'zir* yaitu jarimah yang dimana hukuman tersebut nantinya akan ditetapkan oleh pihak berwajib. Dan baik penentuannya maupun pelaksanaan akan ditentukan oleh pengadilan atau hakim.

**Kata kunci:** *Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana Pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM)*

## **ABSTRACT**

Article 54 of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas and Article 480 of the Criminal Code regulates the prohibition of anyone who is not allowed to imitate or falsify fuel oil including diesel fuel, this is contrary to the actions of suspects DAA and MK in Kertapati District, Palembang City who committed the crime of copying diesel fuel oil. The subject of study in this research is how police efforts in overcoming criminal acts for perpetrators of diesel fuel smuggling and Islamic criminal law review of sanctions for perpetrators of criminal acts of diesel fuel smuggling who commit criminal acts of fuel smuggling. The purpose of this research is to find out how the efforts of the police in overcoming criminal acts for perpetrators of fuel oil smuggling, and the review of Islamic criminal law on sanctions for perpetrators of criminal acts of diesel fuel smuggling. This research includes empirical juridical research, namely with data collection techniques in the form of field research and literature. The conclusion of this research is to take legal measures such as arrest, detention of the perpetrator while serving his criminal period. This includes a network of justice systems, namely the police sub-system, prosecutors, courts and correctional institutions as the main means. According to the view of Islamic criminal law on sanctions for perpetrators of criminal acts of diesel fuel, that the perpetrators are subject to ta'zir punishment, namely jarimah, where the punishment will be determined later by the authorities. And both the determination and implementation will be determined by the court or judge.

***Keywords: Islamic Criminal Law, Criminal Acts of Fuel Oil Compounding***